

Hasil Konsultasi Publik mengenai Hak Pilih Narapidana dan Usulan Langkah ke Depan

Hari ini (9 April) Pemerintah mengumumkan hasil konsultasi publik mengenai hak pilih narapidana dan usulan langkah ke depan berdasarkan pendapat yang diterima dalam pelaksanaan konsultasi.

Di antara tanggapan yang diterima, sebagian besar meminta dihapuskannya larangan yang ada sekarang ini bagi narapidana untuk didaftar sebagai pemilih. Mayoritas pendapat dari forum publik juga mendukung penghapusan larangan ini.

Mengenai opsi kebijakan tentang hak pilih narapidana, 49% dari tanggapan yang diterima mendukung diizinkan narapidana untuk memilih tanpa memandang lama hukuman mereka. Selanjutnya 24% lagi mendukung penghapusan larangan memilih baik bagi narapidana maupun orang yang dihukum karena masalah yang terkait dengan pemilihan umum atau pelanggaran penyuapan. Hanya 4% yang mendukung dilarangnya narapidana sebagai pemilih berdasarkan lama hukuman mereka.

Hasil jejak pendapat menunjukkan bahwa sekitar 57% orang yang diwawancarai mendukung diizinkan narapidana untuk memilih tanpa memandang lama hukuman mereka. Hanya 34% dari mereka yang diwawancarai tidak mendukung diizinkan semua narapidana untuk mempunyai hak pilih.

Seorang juru bicara Biro Urusan Perundang-undangan dan Cina Daratan (*Constitutional and Mainland Affairs Bureau*) mengatakan, “Setelah memperhatikan pelaksanaan konsultasi, kami mengusulkan dihapusnya larangan bagi narapidana untuk didaftar sebagai pemilih dan untuk memilih.”

Ada perbedaan pendapat mengenai larangan yang ada sekarang ini bagi orang yang dihukum karena kesalahan yang terkait dengan pemilihan umum atau pelanggaran penyuapan, apakah larangan itu tetap ada atau dihapus. Sekalipun ada persentase yang tinggi dari jumlah responden dalam jejak pendapat yang mendukung dipertahankannya pembatasan yang ada, namun banyak sekali tanggapan yang diterima meminta penghapusan pembatasan tersebut. Dasar pemikiran penting dalam pemberian dukungan adalah bahwa hak pilih merupakan hak politik dasar yang dinikmati oleh setiap orang. Orang yang dinyatakan bersalah telah dihukum karena pelanggaran yang dilakukannya

dengan menjalani hukuman penjara, maka pemberian hukuman tambahan dengan merampas hak pilih mereka adalah tidak adil.

“Dengan memperhatikan pendapat yang diterima selama konsultasi dan bahwa banyak yurisdiksi luar negeri tidak mempunyai batasan pada hak pilih narapidana, maka kami mengusulkan dihapuskannya larangan untuk memilih dan didaftar sebagai pemilih bagi orang yang dihukum karena kesalahan yang terkait dengan pemilihan umum atau pelanggaran penyusunan yang ada sekarang ini.”

Hasil pelaksanaan konsultasi telah menunjukkan banyaknya dukungan publik terhadap pengaturan pemungutan suara bagi narapidana dan tahanan sementara yang diusulkan dalam dokumen konsultasi, termasuk alamat pendaftaran narapidana untuk tujuan pendaftaran pemilih, akses materi yang terkait dengan pemilihan dan pengaturan untuk pemberian suara serta penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum (Electoral Affairs Commission) akan membuat rincian pengaturan ini dengan badan-badan penegakan hukum.

“Hasil pelaksanaan konsultasi dan usulan langkah ke depan akan disampaikan kepada Panel Dewan Legislatif Urusan Perundang-undangan (Legislative Council Panel on Constitutional Affairs) dalam rapatnya pada tanggal 20 April. Kami berencana mengajukan rancangan amandemen kepada Dewan Legislatif dalam sesi legislatif tahun 2008/09 untuk mengamandemen ketentuan pelarangan yang terkait,” kata juru bicara tersebut.

Pelaksanaan konsultasi publik yang berlangsung selama enam minggu tersebut berakhir pada tanggal 23 Maret. Selama masa konsultasi, secara keseluruhan terdapat 70 tanggapan yang diterima. Pemerintah juga menyelenggarakan dua forum publik dan bertemu dengan organisasi-organisasi yang tertarik dengan isu ini guna mengumpulkan pandangan mereka. Sebuah jejak pendapat juga dilaksanakan untuk mengukur lebih jauh pandangan publik.

Laporan mengenai hasil konsultasi dapat diperoleh di Pusat Penerangan Umum Departemen Dalam Negeri (Public Enquiry Service Centers of the Home Affairs Department) atau dapat juga didownload dari situs web Biro Urusan Perundang-undangan dan Cina Daratan (Constitutional and Mainland Affairs Bureau).

Selesai/Kamis, 9 April 2009